

BAB II

PROFIL NAHDLATUL ULAMA

Bab II ini akan mencoba, pada bagian yang pertama, menggali latar belakang eksistensi dan karakteristik NU dengan melakukan penelusuran sejarahnya sejak berdiri tahun 1926. Betapapun, pembahasan ini adalah sebuah versi paling sederhana dari suatu sejarah yang sangat panjang dan rumit. Selanjutnya akan dilihat latar-belakang pemikiran keputusan kembali ke khittah 1926 yang ternyata memiliki akar sejarah cukup jauh ke belakang, dan bukan sekedar karena rasa kecewa terhadap PPP sebagaimana dituduhkan oleh sementara kalangan.

A. NU DALAM LINTASAN SEJARAH (1926-1984)

1. NU sebagai Organisasi Agama (1926-1934)

Sejarah formal NU dimulai sejak ia didirikan 31 Januari 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan dibantu sejumlah ulama sepaham seperti KH. Wahab Hasbullah serta beberapa ulama pesantren lainnya. Namun bagi NU sendiri, berdirinya *jam'iyah diniyah* ini tidak jarang dipandang sekedar sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang telah

mengakar sebelumnya.¹ Jauh sebelum NU lahir sebagai organisasi, ia telah ada dalam bentuk komunitas yang diikat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakter sendiri sebagai penganut paham *ahlu sunnah wal-jamaah*. Wujud sebagai organisasi tidak lain adalah "penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham".²

Arti penting dibentuknya wadah organisasi ini tidak lepas dari konteks waktu yang ada pada saat itu, terutama berkaitan dengan upaya menjaga eksistensi diri jamaah yang tradisional berhadapan dengan arus besar paham pembaharuan Islam, atau persisnya: kaum pembaharu, yang di Indonesia ketika itu bahkan telah terlembagakan, antara lain yang terpenting adalah Muhammadiyah.

Masuknya paham pembaharuan ke Indonesia diawali oleh dibukanya Terusan Zues (1869) yang memungkinkan semakin banyaknya umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Tidak jarang mereka menetap di sana hingga bertahun-tahun. Bersamaan dengan membengkaknya jamaah haji

¹Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926 (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 1, atau lihat pula dalam KH. Saifuddin Zuhri, KH. Abdullah Hasbullah, Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama (Jakarta: Yamunu, 1972) h. 26.

²Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (Sala: Jatayu, 1985), h. 1. Lihat juga pada H. Anas Thohir, et.al. (eds.), Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia (Surabaya: PCNU Kodya Surabaya, 1980), h. 90.

Indonesia ini, di Timur Tengah sedang merebak ajaran pembaharuan dan purifikasi ajaran Islam, seperti gerakan pembaharuan Muhammad Abdul Wahab yang dikenal sebagai gerakan Wahabiyah, maupun pemikiran Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani yang kemudian dilanjutkan oleh kawan sekaligus muridnya, Muhammad Abduh.³ Kontak pemikiran yang intensif antara para jamaah haji Indonesia dengan paham pembaharuan ini banyak berlangsung, sehingga ketika kembali ke tanah air, para haji itu membawa serta pemikiran untuk memurnikan ajaran Islam dan membersihkannya dari unsur-unsur yang dianggap berasal dari tradisi di luar ajaran Islam.

Tidak semua kalangan mengadopsi paham pembaharuan itu secara bulat-bulat. Sekelompok ulama pesantren (yang *nota bene* juga haji) menilai bahwasanya penegakan ajaran Islam secara murni tidak mesti berimplikasikan perombakan total terhadap tradisi setempat. Sebab yang disebut terakhir ini bisa saja diselaraskan dengan ajaran Islam secara luwes. Kalangan yang dikenal sebagai kelompok ulama tradisional ini, karenanya mengambil upaya purifikasi ajaran agama Islam dengan harap-harap cemas. Sebab bukan mustahil jika hal itu dilakukan dengan terlalu frontal dan radikal akan

³Untuk mendapat gambaran gerakan Wahabiyah, lihat antara lain pada: Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Study Perbandingan (Jakarta: Bulan Bintang 1993).

menimbulkan guncangan dalam masyarakat. Terlebih lagi ternyata usaha itu terindikasikan pendobrakan tradisi keilmuan yang selama ini dianut oleh para ulama pesantren yang merupakan masalah *khilafiyah furuiyah* antara mereka dengan kalangan Islam modernis. Perkembangan inilah yang oleh para ulama pesantren lalu dinilai sebagai ancaman terhadap kelestarian ahlu sunnah wal-jamaah yang mereka anut. Oleh karena itu, mereka berupaya membuat suatu penyeimbang bagi arus gerakan pembaharuan ini, dan dalam alur inilah NU terbentuk.⁴

Latar belakang lahirnya NU ini perlu memperoleh perhatian sebab karakteristik organisasi ini kemudian adalah berakar di sini. Hal penting yang perlu dicatat dari

⁴Tentang masuknya paham pembaharuan ke Indonesia, serta reaksi kalangan tradisional terhadapnya, dari sudut pandang "orang NU", lihat Marijan, Op. Cit., h. 1-17; Anam, Op. Cit., h. 33-56. Dari sudut pandang "kaum modernis", lihat Dellar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1980), dan dalam visi objektif seorang pengamat asing, lihat Manfred Ziemek, Pesantren Dalam Perubahan Sosial, alih bahasa BB. Soendjojo (Jakarta P3M, 1986), h. 59-66. Jelas, bukan paham pembaharuan an-sich yang dipersoalkan oleh ulama pesantren. Mereka dapat menerima paham itu. Ulama-ulam NU seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, sebagaimana KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), pernah selama bertahun-tahun menimba ilmu di Makkah, dan sudah barang tentu, menyerap pula pengaruh gerakan Wahabiyah dan lainnya. Perbedaan antara ulama tradisional dengan kalangan yang kemudian dikenal dengan kelompok Islam Modernis di Indonesia bukanlah pada persoalan menolak atau menerima paham pembaharuan, tetapi menyesuaikannya dengan tradisi yang mereka anut. Lihat Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), h. 58-62.

proses kelahiran yang pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap arus pembaharuan Islam dan situasi kolonial tersebut, yakni bahwa pola perilaku reaktif terhadap arus pembaharuan Islam dan situasi kolonial kala itu, ternyata menjadi *inheren* dalam dinamika NU selanjutnya. Refleksi pola perilaku reaktif NU ini antara lain yang akhirnya membawa keluarnya NU dari Masyumi yang kemudian belakangan PPP setelah diawali oleh rasa kecewa terhadap keduanya.

Apa yang dapat disimpulkan dari wacana di atas, bahwa betapapun NU terutama sekali lahir dan berdiri sebagai organisasi sosial-keagamaan, namun kibaran panji-panji keagamaan yang ada telah dipikul dengan semangat politis yang cukup jelas pula. Visi politis jamaah yang terwadahi dalam NU, dengan sub-sub wadah berupa pesantren, tercermin misalnya dalam sikap eskapisme mereka berhadapan dengan kolonialis. Baik secara fisik dengan mengundurkan diri dari daerah urban ke daerah pedesaan yang relatif jauh dari jangkauan Belanda, maupun secara psikologis dengan menjauhi segala hal yang dianggap berbau Belanda, seperti pemakaian dasi, bahkan celana panjang (dalam hal mana kalangan modernis berpandangan lain).

Sejak awalpun, NU mempunyai potensi politik yang tidak dapat dianggap kecil. Disamping sebab yang mendasar bahwa dengan karakteristiknya yang universal, Islam tidak bisa dipisahkan dari politik, dan sebaliknya, politik tidak

bisa dipisahkan dengan Islam, maka seperti di catat dalam Saifuddin Zuhri,

Sejak lahirnya, aspirasi yang melingkupi NU adalah aspirasi pesantren Baik pesantren selaku persemaian (pembinaan) kader-kader ulama dan pemimpin Islam tetapi pesantren juga pembina potensi gerakan yang sejak dahulu diakui oleh kaum intelektual sebagai media pendidikan yang praktis dan efektif membentuk potensi yang bergerak (tidak beku).⁵

Keeratan NU dengan pesantren selaras dengan tujuannya yang hendak melestarikan ajaran ahlu sunnah wal-jamaah, yang merupakan materi terpenting yang diajarkan di pesantren, yang tercermin dari diajarkan kitab-kitab klasik (kitab kuning). Pesantren sendiri memiliki perkembangan yang cukup unik. Antara satu pesantren dengan lainnya umumnya terdapat suatu hubungan genealogis yang rumit dan kokoh. Jaringan ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan buah dari usaha yang direncanakan secara matang dalam upaya melestarikan tradisi pesantren yang dilakukan dengan membangun solidaritas dan kerja-sama yang sekuat-kuatnya antara sesama kyai. Cara praktis yang dilakukan adalah dengan mengembangkan suatu jaringan aliansi perkawinan *endegamous* antara keluarga kyai.⁶ Eratnya

⁵Saifuddin Zuhri, Op. Cit., h. 118

⁶Tentang hubungan kekerabatan antara pesantren, khususnya antara kyai, lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 61-99.

hubungan antara pesantren yang diikat oleh tali kekerabatan ini, yang tentu saja ditopang oleh soko guru ikatan akidah, menjadikan pesantren sangat potensial sebagai basis gerakan politik. Dan disinilah NU berakar.⁷

2. NU Masa Kesadaran Politik (1934-1952)

Selama beberapa waktu, orientasi politik dalam diri NU memang masih bersifat laten, dalam pengertian bahwa sepanjang waktu itu NU masih tidak terlibat dalam gerakan politik praktis. Lahan politik ketika itu praktis menjadi garapan golongan nasionalis dan segelintir golongan Islam modernis yang berada di Serikat Islam (SI).

Orientasi politik NU baru muncul secara lebih terbuka setelah tampilnya beberapa tokoh muda NU seperti Wahid Hasyim, Mahfudz Siddiq, dan lain-lain. Lahirnya sekelompok generasi muda ini dalam tubuh NU sekitar pada pertengahan dekade tiga-puluhan.⁸ Buah konkret semakin bertumbuhnya

⁷Sebuah ilustrasi menarik adalah apa yang dikemukakan oleh Zainal Arifin Thoha dan M. Aman Musthafa, bahwa NU dikatakan sebagai "pesantren besar" sementara pesantren adalah "NU kecil". Pola seperti ini merupakan kultur yang khas di Indonesia. Lihat pada: Pengantar, dalam M. Fajrul Falaakh, et.al. Membangun Budaya Kerakyatan, Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU, (Yogyakarta: Titian Insani Press, 1997), h. 8.

⁸Chairul Anam menyebutkan bahwa munculnya tokoh-tokoh muda itu merupakan satu dari tiga fenomena yang menandai awal perkembangan NU setelah muktamar IX (1934). Dua fenomena lainnya adalah pemisahan bidang *Syuriyah* dan

orientasi politik itu adalah bergabungnya NU dengan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) tahun 1939. MIAI sendiri dibentuk pada tahun 1937 atas dasar keinginan untuk membuat tali persatuan umat Islam Indonesia. Sekalipun dua dari empat tokoh pendiri MIAI berasal dari NU, namun mereka hadir atas nama pribadi. Baru dua tahun kemudian, NU turut bergabung dalam wadah MIAI ini.⁹ Dalam asumsi Syafii Maarif, MIAI didirikan karena terdorong oleh contoh yang kompetitif dari golongan sekuler yang berusaha mempersatukan diri.¹⁰

MIAI secara umum memang bergerak dalam bidang keagamaan. Namun begitu, dalam setiap aktivitasnya sarat terkandung muatan-muatan politis. Tidak lain adalah karena

...Continued...

Tanfidziyah dalam Muktamar itu, setelah sebelumnya sidang-sidang selalu dipimpin oleh Syuriah; serta dibenahinya tata-cara sidang. Lihat Anam., Op. Cit., h. 89-91.

⁹MIAI didirikan oleh KH. Wahab Hasbullah (NU), KH. A. Dahlan (NU, bedakan dengan KH. Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah, dan telah meninggal pada tahun 1923), KH. Mas Mansur (Muhammadiyah), dan W. Wondoamiseno (SI). Pada awalnya, yang menjadi anggota federasi organisasi ini adalah: SI, al-Islam (Solo), Persyarikatan Ulama (Majalengka), Muhammadiyah, Hidayatul Islamiyah (Banjuwangi), al-Khairiyah (Surabaya), dan al-Irsyad (Surabaya). Tentang pembentukan MIAI ini, lihat Noer, Op. Cit., h. 260-267.

¹⁰A. Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 96. Agaknya yang dimaksud adalah terbentuknya PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Kebangsaan Indonesia kemudian Permufakatan Politik Pengejar Kemerdekaan Indonesia) di awal tahun 30-an. Organisasi yang kelahirannya turut dibidani oleh SI ini ternyata kemudian tidak lebih dari sekedar wadah legitimasi konflik antar golongan Islam dan nasionalis-sekuler. Lihat Noer, Ibid., h. 261-315.

politik merupakan bagian universalitas Islam, sebagaimana bidang ekonomi, kemasyarakatan, dan seterusnya. Setiap Kongres yang diadakan (1938, 1939, dan 1941) praktis selalu membuahkan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Belanda, yang dilakukan melalui pengajuan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah, baik dalam hal yang secara langsung berkaitan dengan masalah keagamaan maupun tidak. Bahkan masalah Internasional, misalnya Palestina yang mulai muncul saat itu, tidak luput dari perhatian MIAI.¹¹ Ketika GAPI (Gabungan Politik Indonesia, sebuah gabungan partai politik sekuler) tampil membawa tema tuntutan Indonesia berparlemen kepada pemerintah, MIAI memberikan dukungan. Betapapun dukungan itu bukannya tanpa reserve, seperti yang kemudian tergambar jelas ketika tuntutan MIAI pada akhirnya adalah Indonesia "berparlemen yang berdasarkan Islam".¹²

Pola interaksi yang dialami dalam MIAI membawa pengaruh besar terhadap NU. Mukktamar NU XV (1940) di Surabaya seolah menjadi ajang penegasan tuntutan-tuntutan yang dilontarkan MIAI, termasuk tuntutan NU antara lain adalah dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan seperti diberlakukannya pertolongan kepada jamaah haji Indonesia yang terperangkap akibat perang antara Belanda-Jerman,

¹¹Noer, Ibid., h. 265-267.

¹²Ibid., h. 289.

mencabut *Guru Ordonantie* (1925) yang dianggap merugikan umat Islam, dan seterusnya. Satu keputusan lain adalah menyangkut siapa yang menjadi presiden di negara Indonesia nanti. Dalam sebuah rapat tertutup yang dihadiri oleh lima tokoh NU, dihasilkan keputusan dua orang calon presiden: Sukarno dan Muhammad Hatta, dengan 10 suara untuk Sukarno, dan satu suara untuk Hatta.¹³

Tidak ada satupun ketentuan yang diajukan itu sempat memperoleh pemenuhan, ketika kedudukan Jepang dua tahun kemudian membuat persoalan tidak lagi relevan. Regim kolonial baru ini segera tampak lebih represif dari pada regim sebelumnya: semua organisasi politik dibekukan, dan setiap kegiatan politik dilarang sama sekali. Orang Islam yang semula berharap banyak kepada "saudara tua" yang membebaskan mereka dari kekuasaan "kafir" Belanda itu segera menemukan kekecewaan mendalam. Lebih lagi ternyata bagi Jepang, sebagaimana Belanda, terpisahnya Islam dari politik adalah bagian dari rencana umumnya, dan karena itu mereka tetap mengawasi secara ketat organisasi-organisasi Islam, utamanya kepada pendidikan Islam.¹⁴ Langkah pertama

¹³Anam, Op. Cit., h. 112.

¹⁴Tentang umat Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang, lihat: Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, alih-bahasa Daniel Dehbidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980). Sebagai perbandingan dengan perlakuan Belanda kepada umat Islam di Indonesia, lihat: Aqib Soeminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1985).

yang dilakukan Jepang adalah dengan mendirikan Kantor Urusan Agama (Shumubu) yang kemudian dipimpin oleh Kolonel Horrie, dengan tindakan pertama menempatkan semua rumah ibadah Islam di bawah pengawasan tentara Dai Nippon.¹⁵ Tindakan selanjutnya adalah pengupayaan terbentuknya sebuah organisasi federasi Islam antara lain ditunjuk untuk menggantikan MIAI yang terkesan anti kolonial. Maka dibentuklah Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1943 di mana NU, sebagaimana dalam MIAI, tersubordinasi di dalamnya.¹⁶

Dalam masa ini sebenarnya NU memperoleh beberapa konsesi seperti yang tampak pada pengangkatan Rais Akbar NU, *Hadratus Syeikh* KH. Hasyim Asy'ari, sebagai kepala Shumubu (menyusul Husein Djajadiningrat yang menggantikan Horie) serta sebagai Ketua Umum Pengurus Masyumi yang pertama, sehingga NU dimungkinkan untuk memainkan peran yang cukup berarti. Keuntungan ini, --kalau memang mungkin untuk dikatakan demikian-- dimungkinkan setidaknya oleh dua hal. Pertama, sikap NU terhadap Jepang terlalu lunak, kalau bukan oportunistik. Berbeda dengan sikapnya terhadap Belanda, maka terhadap Jepang, NU lebih bersikap lebih

¹⁵ Ibid., h. 142.

¹⁶ Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (Jogjakarta: LKiS 1994) h. 61-62.

kooperatif. NU bersedia duduk dalam *Chuo Sangi-in*, sementara untuk badan serupa di jaman Belanda, *Volksraad*, sama sekali menolak. Anam melihat bahwa sikap semacam itu didasari oleh pemikiran bahwa kemerdekaan Indonesia hanya tinggal waktu saja, sehingga perlu dimanfaatkan isu kolaborasi dengan Jepang dalam bentuk apapun guna tercapainya kemerdekaan itu.¹⁷ Sikap lunak NU terhadap Jepang tentu saja sepanjang tidak melemahkan sendi-sendi aqidah Islam. Terhadap perintah untuk melakukan *Seikerei* (ritual penghormatan kepada Tenno Heika dengan cara ruku ke arah matahari terbit) misalnya, NU menunjukkan sikap menentang yang sangat keras, sehingga muncullah pemberontakan bersenjata di Singaparna.¹⁸

Kedua, berkaitan dengan keinginan Jepang untuk menggalang semua kekuatan anti-Belanda ke pihaknya, sehingga mereka perlu memberikan perilaku baik, serta pemenuhan keinginan secara baik pula, terhadap umat Islam khususnya yang berada di pedesaan,¹⁹ NU mau tidak mau adalah kuncinya.

Suatu manfaat lain yang bisa diperoleh NU dengan siasat sikap lunaknya terhadap Jepang adalah berupa

¹⁷Anam., Op. Cit., h. 114-124.

¹⁸Lihat Sitompul, Op. Cit., h. 92.

¹⁹Benda, Op. Cit., h. 141.

pelatihan keterampilan militer bagi para santri dan kyai di pesantren, yang kemudian melahirkan milisi-milisi Hizbullah dan Sabilillah.²⁰ Kedua milisi ini selanjutnya, setelah kemerdekaan turut menjadi kompartemen TNI pada awalnya.²¹ Kalangan NU memandang pada umumnya, saham mereka pada perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan disumbangkan melalui milisi itu. Sementara di panggung perjuangan politik, peran NU tersalur melalui Masyumi, yang dibentuk setelah proklamasi.

Yang disebut terakhir ini adalah sebuah partai politik yang berbeda dan terlepas sama sekali dari organisasi dengan nama yang sama di jaman Jepang, kecuali

²⁰Anam, Op. Cit., h. 119.

²¹TNI lahir sebagai paduan tiga unsur pokok yang masing-masing memiliki karakteristik-karakteristik berbeda. *Pertama*, bekas tentara KNIL. Kelompok ini mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam tugas-tugas staf. Perwira TNI yang berasal dari kelompok ini adalah Nasution, Simatupang, Urip Sumoharjo, dan sebagainya. *Kedua*, bekas prajurit PETA. Nama-nama seperti, Sudirman, Rambang Sugeng, maupun yang lebih junior seperti Ahmad Yani, Suharto dan lainnya, adalah berasal dari kelompok ini. *Ketiga*, bekas laskar-laskar perjuangan. Yaitu kelompok milisi yang memiliki afiliasi --baik politik maupun etnis-- beraneka ragam. Hizbullah dan Sabilillah berada dalam kelompok ini. Mengenai unsur-unsur dalam TNI ini, lihat Yahya Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), h. 29-31, atau lihat pula Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967, alih-bahasa Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 21-22.

Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam tidak dapat bertahan lama, bahkan sejak awal-pun tidak utuh. Dalam dua bulan yang sama terbentuknya Masyumi, di Bukittinggi, Perti juga menyatakan diri sebagai partai politik Islam. Dan Dua tahun kemudian, karena adanya peluang untuk duduk dalam Kabinet Amir Syarifuddin, sementara Masyumi menolak peluang ini, Perti memutuskan keluar dari Masyumi dan tampil sebagai partai politik.²⁶ Dengan alasan tersendiri, lima tahun kemudian NU menyusul.

3. NU sebagai Partai Politik (1952-1973)

Struktur Pimpinan Pusat Masyumi terdiri dari Pimpinan Partai yang melakukan tugas eksekutif sehari-hari) dan Majelis Syuro (semacam Dewan Pertimbangan dan pemberi fatwa Pimpinan Partai dalam garis besar tindakan partai). Secara tradisional posisi penting dalam Majelis Syuro dipegang oleh tokoh-tokoh dari NU. Sementara pimpinan partai yang sangat dominan diisi oleh kalangan pembaharu yang biasanya para intelektual. Sebenarnya struktur pimpinan semacam ini lebih banyak menimbulkan persoalan kompartementalisasi antara unsur dalam partai federal ini. Terlebih lagi tidak pernah begitu jelas perincian tugas antara kedua struktur pimpinan itu. Suasana hubungan antara keduanya sangat kondusif

²⁶ Ibid., h. 76-77.

terhadap konflik, dimana akhirnya Majelis Syuro terus menerus digiring kearah peran yang semakin tidak berarti,²⁷ sehingga akhirnya hanya menjadi "dewan penasehat" yang seringkali tidak begitu diindahkan. Di sinilah bersumber kekecewaan NU terhadap Masyumi yang muncul kemudian.²⁸

Sumber lain adalah berkaitan dengan jabatan Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo. Dalam klaim NU, kursi Menteri Agama adalah bagian mereka, sebab disamping sudah demikian adanya sejak awal kemerdekaan, NU menilai bahwa dirinya sebagai cerminan dari mayoritas umat Islam Indonesia dilihat dari segi "ilmu, akidah, dan amaliahnya". Namun karena pertimbangan-pertimbangan lain, Masyumi mengajukan nama Fakih Usman (Muhammadiyah) kepada formatur kabinet untuk jabatan itu. 8 April 1952, hanya dua hari dari pencalonan itu disetujui oleh formatur kabinet, NU memutuskan keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai Parpol.²⁹

²⁷Perubahan struktur organisasi Masyumi dari periode ke periode cukup menggambarkan kelemahan peran Majelis Syuro di dalamnya. Lihat Ibid., h. 69-71.

²⁸Ibid., h. 80-81, tuntutan NU ini dapat juga dilihat pada, Syafiq A. Mughni, Hasan Bandung Pemikir Radikal Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 92.

²⁹Tentang berbagai peristiwa ini, lihat Deliar Noer, Ibid., 79-94, atau dapat juga dilihat pada M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik, (Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat 1991), h. 79-94

Sebab-sebab itulah yang umumnya dipandang sebagai faktor pendorong keluarnya NU dari Masyumi. tapi Zamakhsyari Dhofier melihat penyebab lain yang lebih menentukan, yaitu dinamika internal NU sendiri. KH. Wahid Hasyim, Ketua Umum PBNU kala itu, memandang bahwa organisasi yang dipimpinnya telah semakin condong ke dalam percaturan politik. Tokoh-tokoh NU muda seperti Idham Khalid, Saifuddin Zuhri, Saichu dan lainnya semakin memerlukan ruang gerak yang cukup luas dalam arena politik ..." (dan hal itu akan) dapat terbuka dengan lebih leluasa setelah NU dapat berdiri sebagai partai politik".³⁰

Perubahan NU menjadi parpol, membawa umat Islam Indonesia kedalam dikhotomi kepemimpinan politik: kepemimpinan politik kaum modernis di Masyumi, dan kepemimpinan politik kyai (ulama) tradisional di NU. Lebih-lebih lagi, hal itu juga membawa perubahan dalam perimbangan kekuatan-kekuatan politik Indonesia saat itu. Hasil-hasil Pemilu 1955 memberikan gambaran yang jelas

³⁰Zamakhsyari Dhofier, KH. A. Wahid Hasyim **Rantai Pembangunan Peradaban Pesantren dengan Peradaban Indonesia Modern**, dalam Prisma, Agustus 1984, h. 80. Keinginan Wahid Hasyim untuk mencari ruang gerak yang lebih leluasa bagi NU tidak memudahkan obsesinya akan persatuan umat Islam dalam satu wadah. Sehingga setelah NU keluar dari wadah Masyumi, dia mendirikan Liga Muslim Indonesia, yang sekali lagi diharapkan dapat menjadi wadah federasi bagi umat Islam Indonesia. Lihat Ibid.,. Dalam hal ini, Wahid Hasyim mempunyai jalan pikiran yang berbeda, kalau bukan berlawanan dengan puteranya yang kontroversial, Abdurrahman Wahid. Lihat catatan kaki nomor .

tentang perimbangan kekuatan baru itu. Di sini, NU mendapatkan perolehan yang mengejutkan, 18,4 % dari seluruh suara yang sah, tidak jauh dari Masyumi, 20,9 %. Hasil ini malah jauh lebih mengesankan lagi di propinsi-propinsi di mana NU mengakar sangat kuat: 34,1 % di Jawa Timur dan hampir 50 % di Kalimantan Selatan. Berdasarkan angka, kelompok pendukung NU berasal dari daerah Jawa Timur dan Tengah. Selengkapnya, jumlah kursi empat partai besar dalam parlemen sementara dan setelah Pemilu adalah :³¹

Jumlah Kursi/Persentase

	Sebelum Pemilu	Sesudah Pemilu	Suara Keseluruhan
PNI	42	57	23,3 %
Masyumi	44	57	20,9 %
NU	8	45	18,4 %
PKI	17	39	16,4 %

Mengingat NU adalah partai yang relatif baru, sehingga persiapan untuk menghadapi Pemilu boleh dikatakan kurang jika dibandingkan dengan partai-partai lain, maka perolehan di atas sungguh di luar dugaan.

³¹Di ambilkan dari Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962:434), sebagaimana dikutip oleh Martin van Bruinessen, Op. Cit..

Mahrus Irsyam³² menilai bahwa prestasi NU itu dimungkinkan oleh adanya perubahan dalam tema kampanye yang dilakukan. Dari tema kampanye yang semula senada dengan Masyumi (tema-tema yang agak naif seperti: Siapa memilih NU, maka akan masuk syurga...), menjadi tema yang lebih menonjolkan garis batas antara NU dan partai lain, khususnya Masyumi. Untuk itu, NU melontarkan isu tentang keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan DI/TII, serta ulah PKI dengan Madiun Affair-nya di tahun 1948. Sehingga seolah-olah, NU menawarkan "jalan selamat" bagi umat dengan memberikan suaranya kepada NU.

Bagi A. Syafii Maarif, faktor penentu terpenting prestasi NU di atas adalah banyaknya jumlah pesantren dengan kyainya yang berpengaruh di tiga pesantren yang menjadi basis massa NU, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

...sebagian besar kyai itu adalah penyokong-penyokong NU yang tangguh. Dalam memperebutkan suara bagi kepentingan kemenangan politik, para kyai mempunyai peranan strategis, khususnya di daerah pedesaan; sedangkan lebih dari 70 % Indonesia masih merupakan daerah pedesaan.³³

³²Mahrus Irsyam, Ulama dan Partai Politik (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), sebagaimana dikutip dalam Sitompul, Op. Cit., h. 120.32.

³³A. Syafii Maarif, Islam dan Masalah Keneeggaraan, Op. Cit., h. 116.

Apapun, yang pasti prestasi spektakuler itu telah membuat posisi NU kian menguat. Setidaknya, itu tercermin dari perolehan kursi NU dalam kabinet koalisi yang terbentuk tidak lama kemudian.³⁴ Jika dalam kabinet sebelumnya NU hanya memperoleh dua jabatan menteri, maka pada kabinet baru itu, NU mendapatkan empat jabatan: Menteri Dalam Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Sosial, dan Menteri Agama, disamping jabatan Wakil Perdana Menteri II yang dipegang oleh Idham Khalid.³⁵

Kabinet koalisi PNI-Masyumi-NU tersebut, sebagaimana kabinet-kabinet lain dalam proses interregnum Demokrasi Liberal ini, tidaklah berumur panjang. Kurang dari setahun semenjak memulai masa kerjanya, kabinet ini jatuh dan digantikan oleh Kabinet Karya yang dipimpin oleh Juanda, sebelum akhirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa sistem politik Indonesia ke dalam era Demokrasi Terpimpin, setelah berapa waktu jatuh-bangun dalam Demokrasi Liberal.

Setelah jatuhnya kabinet koalisi ini, peran partai

³⁴Perhatikan bahwa tidak ada partai yang memperoleh suara mayoritas dalam Pemilu 1955. Sehingga kabinet yang terbentuk kemudian adalah hasil koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Sukarno sebenarnya menginginkan PKI diikutkan dalam koalisi itu, tapi NU dan Masyumi menolaknya dengan keras. Lihat Ibid., h. 123

³⁵Tentang komposisi kabinet di Indonesia dari masa ke masa, lihat antara lain Mashuri Maschab, Kekuasaan Eksekutif di Indonesia (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), h. 28-110.

politik semakin merosot sama sekali. Kabinet karya yang formulasinya disusun oleh "warga negara Sukarno", dipretensikan sebagai kabinet ekstra parlementer yang non-partai, sekalipun mengikut sertakan beberapa tokoh partai yang diwakili di parlemen. Selama beberapa waktu dalam masa transisi di Demokrasi Terpimpin, partai-partai politik termasuk NU, memindahkan "medan tempurnya" dari politik praktis kepada perjuangan ideologis tentang dasar negara dalam Majelis Konstituante.³⁶ Dalam perjuangan ideologis itu pada mulanya ada tiga usul yang diajukan sebagai dasar negara adalah: Pancasila, Islam dan Sosial-ekonomi. Karena sedikitnya usulan yang dikemukakan terakhir, maka perdebatan masalah dasar negara dalam konstituante adalah hanya meliputi dua usulan yang pertama. Cukup dikatakan bahwa suara NU (meskipun NU mendukung usulan Islam sebagai dasar negara) dalam perdebatan itu tidak seberapa focal jika dibandingkan dengan kalangan Islam Modernis, khususnya dalam Masyumi, seperti Natsir. Persisnya NU tidak segigih kalangan modernis dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.³⁷

³⁶Maarif., Op. Cit

³⁷Untuk membahas perdebatan ideologis antara kelompok Islam dan golongan nasionalis, lihat Ibid., h. 142-176. Lihat juga Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 21-101, atau lihat juga dalam, Endang Saifuddin Anshari Wawasan Islam, Pokok-

Dalam Demokrasi Terpimpin, panggung pentas politik Indonesia praktis dikuasai oleh tiga aktor politik: Sukarno, PKI, dan Angkatan Darat, dengan menyisakan sedikit porsi peran yang tidak berarti untuk partai-partai politik yang ada. Beberapa partai politik justru tidak memiliki daya survival berhadapan dengan upaya penyederhanaan kepartaian yang dilakukan oleh Sukarno, sehingga akhirnya hanya tersisa sepuluh partai. Masyumi termasuk yang disingkirkan, terutama karena keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemberontakan PRRI. Sementara NU karena sikap akomodatifnya lebih mampu bertahan. Dalam catatan A. Syafii Maarif:

Sayap pesantren, yaitu NU bersama PSII dan Perti, diijinkan hidup dibawah payung Demokrasi Terpimpin. Dengan gaya mereka masing-masing partai-partai ini telah melakukan berbagai langkah penyesuaian diri dengan berbagai perkembangan politik yang rumit. Strategi dasarnya adalah bagaimana menyenangkan sesepuh (Sukarno) dan menjaga agar Sukarno tidak menjadi berang sehingga bersedia melindungi kepentingan mereka.³⁸

Walaupun demikian, upaya untuk menggalang persatuan umat Islam terus-menerus dilakukan oleh NU, terutama untuk mengimbangi kekuatan PKI yang terus membesar. Betapapun oportunistiknya NU terhadap regim Demokrasi Terpimpin,
 ...Continued...

pokok Fikiran tentang Islam dan Ummatnya (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. III, 1991), h. 257-270.

³⁸ Maarif, *Op. Cit.*, h. 184.

namun berhadapan dengan PKI NU tetap memilih untuk berada dalam "garis keras"-nya.³⁹ Bahkan ketika semakin jelas adanya tindakan PKI yang memberikan latihan dan perlengkapan militer kepada pemuda-pemudanya, maka Subhan ZE, seorang tokoh muda NU (betapapun hal ini dapat dipandang sebagai refleksi pola perilaku reaktif NU), segera mengkoordinir pemuda-pemuda dari PMII, HMI, Anshor, Muhammadiyah dan Bahkan kemudian PMKRI, dan merencanakan untuk mengimbangi usaha PKI itu. Latihan kemiliteran bagi para pemuda yang digalang Subhan ZE masih berupa rencana, ketika suatu "prahara politik" merebak di hari pertama bulan Oktober 1965 dan menandai tahap awal dari serangkaian proses berakhirnya era Demokrasi Terpimpin.

Peristiwa percobaan kudeta oleh apa yang menamakan dirinya G-30-S yang melibatkan kalangan ini, termasuk unsur-unsur dari dua aktor dari segitiga kekuasaan Demokrasi Terpimpin, PKI dan Angkatan Darat segera meninggalkan epilog panjang: meluasnya perasaan anti-PKI di kalangan masyarakat; runtuhnya pola hubungan segitiga Sukarno-PKI-Angkatan Darat yang menaikkan militer sebagai dominator kekuasaan; krisis ekonomi dan Inflasi yang parah; disamping tentu saja krisis politik yang nyaris membawa

³⁹Tentang upaya-upaya (yang kebanyakan benar-benar berhenti sebatas upaya tanpa hasil yang memuaskan) NU untuk setidaknya mengimbangi PKI, lihat Anam, Op. Cit., h. 236-241.

negara kwe jurang chaos. Pengggalangan kekuatan anti komunis yang pernah dilakukan Subhan ZE akhirnya menemukan relevansinya, dan terbentuklah KAP- Gestapu, sebuah kekuatan aksi pengganyangan G-30-S yang kemudian "menuntut dilarangnya PKI, dibersihkannya kabinet, parlemen, MPRS, dan semua lembaga negara dari orang-orang komunis dan simpatisan mereka".⁴⁰

NU dengan pemuda anshor-nya telah memotori aksi anti-PKI di kalangan sipil segera setelah G-30-S, dan NU pula yang lebih banyak terlibat dalam pembantaian yang dilakukan dengan sepengetahuan, kalaupun bukan digerakkan, Angkatan Darat. Bahkan di Jawa Timur, Anshor bergerak spontan mendahului tentara. Antara 250.000 hingga 500.000 orang terbunuh dalam penumpasan PKI secara fisik itu, yang segera disusul dengan pembubaran PKI secara formal, sehari setelah ditandatanganinya Surat Perintah 11 Maret 1966.⁴¹ Surat

⁴⁰Sandhaussem, Op. Cit., h. 378.

⁴¹Mengenai pembantaian orang-orang komunis beberapa bulan setelah pemberontakan G-30-S, lihat Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia, alih bahasa TH. Sumartana (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), h. 162-174. "Sikap keras NU terhadap PKI (ini) bukan hanya karena motivasi politik, tetapi yang paling dominan adalah motivasi agama", Anam, Op. Cit., h. 244. Sundhaussen menilai bahwa pembantaian orang-orang PKI baik oleh kelompok Muslim dan kelompok lain sebenarnya buah dari arogansi mereka (orang PKI) terhadap lawan politik mereka di masa-masa sebelumnya. "Orang-orang komunis mencap lawan-lawan mereka sebagai setan-setan desa, musuh kontra revolusioner dari negara, sampah masyarakat. Mereka memperolok dan menghina agama yang menyebabkan umat Islam untuk berjihad". Sundhaussen, Op. Cit., h. 387.

Perintah ini sekaligus melahirkan lahirnya sebuah tatanan politik baru yang membawa komitmen untuk "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen" serta mengoreksi semua kesalahan yang pernah diperbuat oleh Orde Lama.⁴²

Betapapun sebenarnya Suharto, dengan Supersemar yang secara de-facto adalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari tangan Sukarno kepadanya, telah memiliki legitimasi untuk berkuasa, namun dia tidak mau bersikap radikal dalam melepaskan Sukarno, sementara pada sisi yang lain dia masih ragu atas popularitas dan dukungan terhadapnya dari rakyat. Suharto tidak mau berspekulasi dengan kemungkinan bersatunya pendukung Sukarno jika terhadapnya dilakukan tindakan keras. Dia kemudian mengambil cara (inkremental) untuk secara bertahap mengurangi kekuasaan Sukarno dan

⁴²Suharto, tokoh sentral Orde Baru, menyatakan tiga penyelewengan dalam Orde Lama. *Pertama*, radikalisme ekstrim kiri PKI dengan segala cara berusaha memonopoli hasil-hasil revolusi dengan menghembuskan perjuangan kelas di Indonesia. *Kedua*, oportunisme politik yang di dorong oleh ambisi di kalangan pribadi penguasa. Dan yang *ketiga*, penyelewengan ekonomi yang lagi-lagi, di dorong oleh kepentingan pribadi. Lihat, "Suharto mengakhiri tiga penyelewengan" dalam Herbert Feith dan Lance Castles, (eds.), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, alih bahasa Min Yubhaar (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 132-135.

akhirnya melepasnya sama-sekali.⁴³

Semula NU, yang secara pandangannya tidak pernah membenarkan perebutan dengan cara apapun agak ragu-ragu untuk memberikan dukungan terhadap Suharto. Namun ketika semakin jelas bahwa Suharto cukup mempunyai pijakan legitimasi yang kuat untuk berkuasa, sementara pada saat yang sama muncul kekecewaan NU terhadap Sukarno yang terakumulasi cepat,⁴⁴ maka NU secara luwes mengalihkan dukungannya dari Sukarno keada Suharto. " Menjelang akhir Januari (1967), NU, dengan mengemukakan alasan moral maupun politik, memisahkan diri dari Sukarno dan menolak Pel-

⁴³Upaya ini dilakukan baik secara konstitusional dengan menekan MPRS agar mengesahkan ketetapan-ketetapan yang diusulkan oleh Angkatan Darat (terutama tentang pengukuhan Supersemar sebagai TAP, MPRS dan menuntut tanggung jawab terhadap Sukarno yang akhirnya bermuara terhadap upaya intensif untuk menyudutkannya), maupun dengan jalan memperkuat tempat berpijaknya (Suharto) sendiri dengan cara memapras perwira pendukung Sukarno dari posisi penting Angkatan Darat yang dilakukan simultan dengan upaya yang sama dengan ketiga angkatan lainnya, bahkan juga lembaga tinggi negara. Lihat Crouch, Op. Cit., h. 220-272, dan juga bandingkan dengan Sundhousen, Op. Cit., h. 411.

⁴⁴Dengan mengutip KH. Wahab Hasbullah dan KH. Saifuddin Zuhri, Khairul Anam, menyebutkan lunturnya dukungan NU terhadap Sukarno adalah karena dia tidak mau untuk segera membubarkan PKI, sekalipun NU telah berusaha untuk mengartikulasikan tuntutan pembubaran PKI itu secara konstitusional dan tidak lewat cara-cara anarkis. Lihat Anam, Op. Cit., h. 249. Tapi perlu dicatat bahwa cara-cara konstitusional itu cuma merupakan episode berikut setelah pada episode berikutnya NU menggunakan cara-cara tindakan kekerasan yang anarkis terhadap PKI.

Nawaksara".⁴⁵ Dalam tahun yang sama, tokoh-tokoh NU dalam DPR-GR mengajukan memorandum yang pada pokoknya mengemukakan beberapa indikasi keterlibatan Sukarno dalam G-30-S, dan karenanya DPR-GR dihimbau untuk mengundang MPRS guna mengadakan sidang istimewa untuk mencabut kekuasaan Sukarno. Memorandum ini kemudian disusul dengan sebuah resolusi yang meminta agar MPRS mengangkat Jendral Suharto sebagai Presiden.⁴⁶ Dukungan NU terhadap ini tidak lepas dari sikap Suharto sendiri. Setelah menilai karakter gembong-gembong NU, para penasehat Suharto mengambil kesimpulan bahwa bila mereka diberikan status dan dana bagi kegiatan keagamaan dan lain-lain, Idham dan rekan-rekannya akan mendukung Suharto sebagaimana mereka telah mendukung Sukarno di masa lampau⁴⁷.

Tuntutan yang segera muncul begitu Orde Baru mulai melangkah adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum. Baik Sukarno maupun partai-partai politik sangat berkepentingan

⁴⁵Sunhaussen, Op. Cit., h. 433. Pel-Nawaksara adalah laporan pelengkap pidato utama Sukarno di depan sidang MPRS dan keengganannya untuk mengutuk PKI.

⁴⁶Lihat Anam, Op. Cit., h. 250; lihat juga Sunhaussen, Ibid., h. 434-436.

⁴⁷Crouch, Op. Cit., h. 296.

dengan diadakannya Pemilu dalam tujuan masing-masing.⁴⁸ Namun Angkatan Darat tentu tidak akan mengambil resiko. Mengadakan pemilu yang hasilnya akan menggambarkan ke arah mana dukungan rakyat mengalir, sementara Angkatan Darat tidak bisa menjamin popularitasnya di kalangan rakyat, adalah bunuh diri dilihat dari sudut pandang mereka. Karena itu pemerintah berusaha memperlambat tempo pemilu dengan jalan mengulur-ulur proses disahkannya UU tentang pemilu. Langkah pertama, seminar Angkatan Darat 1966 mengusulkan rancangan UU tentang pemilu yang sedemikian rupa sehingga banyak mengundang kritik dari wakil-wakil rakyat di DPR-GR, dan karenanya jelas tidak dapat di setuju dalam waktu singkat. Akibatnya, pemilu yang semestinya dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1968, secara teknis tidak mungkin berjalan.⁴⁹ Dalam masa ini tercatat berdirinya sebuah Partai Muslim Indonesia (Parmusi) pada tanggal 20 Januari 1968. partai ini sebenarnya lahir prematur dari kandungan keinginan untuk menghidupkan kembali Masyumi. Pemerintah

⁴⁸Sukarno menginginkan pemilu karena itu adalah cara yang efektif untuk mengurangi kekuasaan Suharto yang belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan popularitasnya di kalangan rakyat. Lihat Sundhaussen, Op. Cit., h. 420. Atau lihat juga Crouch, Op. Cit., h. 230. Sementara tuntutan partai-partai terhadap pemilu didasari oleh keinginan untuk kembali menggali perang politik mereka. Dengan Pemilu, dukungan terhadap parpol dari akar massa mereka masing-masing akan termobilisir riil. Lihat Crouch, Ibid., h. 278.

⁴⁹Mengenai upaya penguluran waktu pemilu ini, lihat antara lain Crouch, Ibid., h. 278-285.

secara tegas menolak keinginan tokoh-tokoh Masyumi untuk merehabilitas partainya, sambil mengingatkan tokoh-tokoh ini akan keterlibatan mereka dalam pemberontakan PRRI.⁵⁰ Maka dengan rekayasa penuh pemerintah terhadap struktur kepemimpinannya, berdirilah Parmusi.

Sementara itu Angkatan Darat terus mengembangkan Golkar, yang didirikan tanggal 20 Oktober 1964 dengan nama Sekber Golkar, menjadi partner sekaligus lengan politiknya. Golkar, yang tidak memiliki akar-akar kuat dibawah, segera menggunakan apa yang kemudian disebut sebagai "taktik bukdazer" untuk mengalihkan suara partai-partai lain terhadapnya. Menghadapi PNI, Golkar diuntungkan oleh Permendagri Nomor 12 tahun 1969 yang mengharuskan Pegawai Depdagri, sumber dukungan PNI, bergabung dengan Kokarmendagri. Demikian pula PP No. 6 tahun 1970 yang mewajibkan pegawai negeri hanya memiliki loyalitas tunggal. Sedangkan menghadapi partai-partai Islam dipilih cara dengan upaya mengambil hati para ulama, antara lain dengan menghidupkan kembali GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Sasaran lain yang diraup Golkar adalah

⁵⁰Penolakan pemerintah terhadap rehabilitasi Masyumi tampaknya didasari keengganannya untuk melihat munculnya kekuatan politik Islam yang besar sebagaimana Masyumi dulu. Alasan Suharto tentang keterlibatan tokoh Masyumi dalam pemberontakan PRRI terasa hipokrit ketika dia kemudian ternyata menyertakan Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom tokoh PSI yang juga terlibat PRRI, dalam kabinetnya.

ex anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya. Walaupun UU pemilu secara khusus melarang orang-orang ini untuk memberikan suaranya dalam pemilu, namun dilaporkan bahwa di beberapa daerah orang-orang ex anggota dan simpatisan PKI yang tidak dibunuh atau dipenjarakan telah diharuskan, di bawah intimidasi tentara, untuk memilih Golkar.⁵¹ Tidak heran jika pemilu 1971 akhirnya menandai ahirnya kekuatan politik dominan yang baru dengan keberhasilan Golkar memperoleh 62,8 % suara dalam pemilu itu.

Parpol-parpol lain umumnya berantakan menghadapi segala taktik Golkar dalam pemilu 1971. hanya NU yang mampu bertahan, yang dengan memperoleh 18,7 % suara telah mewmbperbaiki penampilannya dalam pemilu 1955.⁵² Kebanyakan pengamat memiliki penilaian yang senada bahwa faktor utama penentu reputasi NU ini adalah peranan kyai dan pesantren

⁵¹Tentang taktik bulldozer Golkar ini lihat Ibid., h. 299-301. Dalam pemilu 1971 tercatat 2.123.747 warga negara yang tidak berhak memilih, Ibid., h. 300. Jika diingat bahwa pada tahun 1965 PKI pernah menyatakan memiliki anggota sebanyak 200 juta orang, dan jika angka ini dikurangi dengan kira-kira 500.000 orang komunis yang dibunuh di akhir tahun 1965 dan awal 1966, serta jika diasumsikan bahwa orang-orang komunis yang tidak berehak memilih itu adalah orang-orang komunis semuanya, maka setelah dikurangi dengan jumlah yang ditahan mereka, secara kasar dapat diperkirakan bahwa kira-kira sejumlah 17 juta ex anggota PKI tidak dihalangi untuk memberikan suaranya. Pernyataan ini boleh jadi kurang argumentatif, namun boleh jadi, mereka inilah yang diraup Golkar.

⁵²Untuk hasil-hasil pemilu 1971, lihat antara lain M. Rusli Karim, Perjalan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret pasang surut (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 170.

yang menjadi basis NU.⁵³ Strategi monoloyalitas yang dilontarkan Mendagri jelas tidak beraerti banyak berhadapan dengan NU yang dipimpin oleh para kyai yang tidak terikat oleh gaji pemerintah. Demikian juga kebijakan floating mass yang direkayasa kemudian, yang memotong akar partai di pedesaan sebagai konsekuensi dari pembatasan di dalam hirarki bagi NU, karena kyai masih menjadi panutan massa Islam yang paternalistik. Dengan mempercayakan diri pada dukungan para kyai di pedesaan, NU berhasil meyakinkan para pemilih di kalangan umat Islam di desa-desa, khususnya daerah seperti Jawa Timur bahwa pemilu adalah suatu ujian bagi iman mereka.

4. NU Masa Depolitisasi (1973-1984)

Februari 1970, dideepkan para pimpinan ke-9 parpol dan Golkar, Presiden Suharto menyampaikan saran tentang pengelompokan partai-partai. Menurutnya, tujuan pengelompokan ini adalah untuk mempermudah kampanye pemilu, dan selanjutnya mempermudah sistim administrasi seperti penyusunan fraksi di DPR kelak, serta bukan untuk melenyapkan partai-partai itu sendiri, sebab setiap partai memiliki identitasnya masing-masing.⁵⁴

⁵³Lihat Marijan, Op. Cit., h. 101. ; Crouch, Op. Cit., h. 302; Fathoni dan Zen, Op. Cit., h. 46.

⁵⁴Lihat Fathoni dan Zen, Op. Cit., h. 47.

Pada kurun waktu antara tahun inilah di istilahkan dengan era depolitisasi, dalam artian ; pada kurun waktu tersebut, dilakukan penyederhanaan terhadap beberapa partai. Tidak berhenti sampai disitu, pihak pemerintahpun berusaha untuk tudak lagi memfungsikan partai politik yang ada secara terus menerus. Di masa ini merupakan periode keterasingan partai politik atas peran yang semestunya dilakukan oleh parpol bersangkutan, dikarenakan adanya intervensi pemerintah dengan mempergunakan pendekatan militer (Security Approach) dan birokrasi sebagai instrumen depolitisasi itu.⁵⁵

Setelah melalui tahapan-tahapan dialog antara pemerintah dan partai-partai, seruan Suharto itu segera memperoleh tanggapan positif. Maka pada bulan berikutnya, terbentuklah pengelompokan dimaksud. PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik bergabung dengan kelompok nasionalis. Sedangkan NU, Parmusi, PSII dan Perti membentuk kelompok spiritual. Kelompok pertama menyebut dirinya sebagai kelompok Demokratik Pembangunan, dan yang disebut belakangan mengambil lebel "kelompok Persatuan

⁵⁵Lacde Ida, Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 32.

Pembangunan".⁵⁶ Sebenarnya Parkindo dan Partai Katholik dapat bergabung dalam kelompok spiritual. Tapi karena perbedaan agama, sementara untuk membentuk kelompok tersendiri tidak memungkinkan, mereka akhirnya lebih memilih sebagai kelompok nasionalis. Pengelompokan ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan fraksi di DPR, sehingga abadan ini memiliki lima fraksi: Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Demokrasi Indonesia, Fraksi Karya Pembangunan, dan Fraksi ABRI.

Kemenangan gemilang Golkar pada pemilu 1971 pada sisi lain, juga semakin memudahkan penguasaan pemerintah terhadap DPR. Pemerintah kemudian dengan jitu mengusulkan RUU kepartaian yang konsep-konsepnya telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam rancangan itu disebutkan bahwa hanya ada tiga partai politik yang akan diakui di Indonesia. Berarti, pemilu berikutnya hanya akan diikuti oleh dua parpol dan Golkar.⁵⁷ Oleh karena itu semakin jelas bahwa penyederhanaan partai sulit ditolak oleh kalangan partai.

⁵⁶Mengenai proses lahirnya Kelompok Persatuan Pembangunan dan lahirnya Partai Persatuan Pembangunan, lihat pada; Slamet Effendi Yusuf et.al., Dinamika Kaum Santri; Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 56. Atau lihat juga antara lain dalam Abd. Aziz Masyhuri, al-Maghfirulah KH. M. Bishri Syansuri; Cita-cita dan Pengabdianya (Surabaya: al-Ikhlâs, 1983), h. 191-196.

⁵⁷Fathoni dan Zen, Op. Cit., h. 47-48. RUU ini tanpa hambatan yang berarti kemudian disahkan sebagai RUU no. 3 tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar.

Maka kelompok Persatuan Pembangunan yang berbentuk federasi terus-menerus mengadakan pendekatan intensif dalam rangka mendahului realisasi fusi, sebelum itu dipaksakan oleh UU Tentang Parpol dan Golkar. Langkah ke arah fusi itu bukannya tanpa hambatan, sebab partai Islam pada mulanya berbeda pendapat tentang fusi itu: Parmusi dan Ferti sejak semula mendukung gagasan fusi, namun tidak demikian halnya dengan NU dan PSII.⁵⁸

Akan tetapi ketika semakin pasti bahwa fusi partai tidak mungkin ditolak oleh partai-partai yang ada, maka perbedaan pendapat itu akhirnya pupus. Sehingga pada tanggal 5 Januari 1973 keempat partai Islam memfusikan dirinya ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandai dengan ditandatanganinya sebuah deklarasi di Jakarta.⁵⁹

Struktur kepemimpinan PPP diusahakan agar dapat menampung semua partai pendukung secara proporsional, agaknya dengan pertimbangan kekuatan hasil pemilu 1971. Itulah sebabnya, dominasi NU dalam partai ini terasa dominan pada awalnya, seperti tampak dari diborongnya

⁵⁸Lihat Marijan, Op. Cit., h. 104.

⁵⁹Deklarasi itu ditandatangani oleh KH. Idham Khalid (NU), HMS Mintaredja (MI), H. Tjekroaminoto (SI), H. Rusli Halil (Ferti), dan KH. Masykur (NU). Isi lengkap dari Deklarasi itu dapat dilihat antara lain pada Syamsuddin Haris, PPP, dan Politik Orde Baru (Jakarta: PT Grasindo, 1991), h. 158.

jabatan penting dalam kepengurusan pusat PPP oleh NU.⁶⁰ Tidak heran jika pada awal retaknya kekompakan ini barangkali sebenarnya tidak terlalu berdampak buruk bagi partai hanya saja pada waktu yang nyaris bersamaan mulai muncul bibit kebencian NU pada PPP yang, sebagaimana terhadap Masyumi dulu, berkisar pada distribusi dalam kekuasaan.

Sekalipun posisi NU cukup kuat diawal Orde Baru, namun tokoh-tokoh NU tidak lagi di libatkan dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Jika pada kabinet pembangunan I masih ada dua tokoh NU yang memegang jabatan menteri, dalam kabinet selanjutnya sudah tidak ada lagi. Dalam kabinet pembangunan II hanya ada dua orang menteri yang berasal dari parpol non-golkar, yaitu HMS. Mintaredja (Parmusi) dan Sunawar Sukowati (FNI). Bahkan jabatan menteri agama yang secara tradisional hampir selalu di pegang oleh NU kini tidak lagi. Dalam kabinet pembangunan I yang disempurnakan, jabatan itu diberikan kepada orang "Tehnokrat" Prof. DR. Mukti Ali.⁶¹ Kecenderungan pemerintah yang sudah enggan untuk bekerjasama dengan kalangan politisi partai non-

⁶⁰Jabatan-jabatan penting yang dipegang NU adalah Presiden Partai, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat, Sekjen, Ketua Umum Majelis Pertimbangan Partai, dan Rais Aam Majelis Syuro. Lihat Haris, *Ibid.*, h. 162

⁶¹Untuk komposisi kabinet-kabinet RI, lihat Mashuri Maschab, *Op. Cit.*,

Golkar ini akhirnya memaksa NU dan partai lain memusatkan perhatian pada lembaga legislatif, tempat terakhir dimana interaksi politik mereka dimungkinkan. Kesempatan tersisa ini menjadi begitu berarti bagi mereka.

Menyadari begitu krusialnya masalah pembagian hasil perolehan kursi di DPR antara keempat unsur didalamnya, PPP jauh-jauh hari sudah berusaha membuat langkah antisipatif. Di tahun 1975, Munas Dewan Partai menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa jumlah rasio perbandingan perolehan kursi untuk masing-masing unsur dari pemilu 1977 adalah didasarkan pada hasil nyata perolehan kursi pada tahun 1971 ketika masing-masing unsur masih berupa parpol. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan "Konsensus 75". Berbekal konsensus inilah PPP menghadapi pemilu 1977. Dari pemilu ini, PPP memperoleh 99 kursi di DPR, meningkat 5 kursi dari 94 kursi perolehan keempat partai Islam dalam pemilu 1971.⁶²

Dengan logika sederhana dapat diduga bahwa penambahan lima kursi itu akan dibagi merata kepada semua unsur. Masing-masing memperoleh tambahan 1 kursi, dibanding dari perolehan dari pemilu 1971, sementara 1 kursi sisanya bolehlah diserahkan kepada unsur dengan jumlah perolehan terkecil. Benarkah demikian dalam prakteknya? Tiga unsur

⁶²Lihat Rusli Karim, *Op. Cit.*, h. 170 dan 183.

memang memperoleh kenaikan jumlah kursi. Parmusi atau (MI) dari 24 kursi di Pemilu 1971 menjadi 25 kursi dalam pemilu 1977. SI dari 10 menjadi 14 kursi. Dan Perti dari 2 menjadi 4 kursi. Namun NU justru mencatat penurunan, dari 58 kursi menjadi "hanya" 56 kursi.⁶³ Rasio perolehan kursi antara kursi ini jelas sedikit menyimpang dari konsensus 75.

Masalah pembagian kursi antara unsur ini memang tidak pernah dipersoalkan oleh NU. Namun bibit kekecewaan sangat boleh jadi muncul di sini, dan mulai retaknya kekompakan PPP dalam kisaran waktu ini tak kurang menjadi lahan persemaian yang baik bagi bibit itu. Lalu, bibit kekecewaan itu segera menemukan pupuk penyuburnya ketika kekompakan PPP yang telah retak semakin rengkah dan tidak dapat ditutup-tutupi lagi.

Menjelang persidangan DPR 1980/1981 terjadi perebutan kursi Ketua Komisi-komisi yang telah menjadi jatah PPP di DPR antara NU dan MI. Awalnya adalah ketika FPP mendapat jatah 13 kursi untuk komisi DPR. Jatah kursi ini, lalu di bagi berdasarkan rasio NU:MI:SI:Perti= 7:4:1:1. Dan sesuai dengan kesepakatan fraksi di DPR, FPP mendapatkan jatah untuk mengetahui komisi-komisi I, VII, dan VIII. Semula, Komisi I diketuai oleh Amin Iskandar (NU), Komisi VII oleh Rahmat Mulyoiseno (NU), dan Komisi VIII oleh Ismail Hasan

⁶³Anam, *Op. Cit.*, h. 268.

Metareum (MI). Lalu di tahun 1978, NU sepakat untuk meminjamkan kursi ketua komisi VII kepada MI, dengan catatan harus dikembalikan setahun kemudian. Pada tahun berikutnya, MI ternyata menolak permintaan NU untuk mengembalikan pinjamannya itu, bahkan MI meminta perpanjangan selama satu tahun. NU setuju. Namun di tahun 1980, MI ternyata bersikeras mempertahankan kursi ketua komisi itu. Ketika NU terus menuntutnya, diadakanlah voting. Tapi, disini NU kalah, karena MI didukung oleh FKP dan FABRI. Rebutan jabatan bahkan sampai merembet pada ketua komisi lainnya. Lagi-lagi NU kalah, sehingga rasio jatah kursi kembali milik FPP antara NU dan MI menjadi 5:6.⁶⁴

Konflik yang cukup keras muncul saat menyusun daftar calon anggota DPR menjelang pemilu 1982. MI menganggap bahwa Konsensus 75 sebagai referensi distribusi kekuasaan sudah tidak berlaku lagi, sebab konsensus ini, yang sejak awalpun tidak begitu konsisten ditaati, dipandang hanya berlaku untuk pemilu 1977. NU berpendapat lain. Bagi NU, komposisi distribusi kekuasaan di FPP setidaknya, harus dipertahankan. Sementara unsur lain terutama MI justru menuntut NU mengurangi jatahnya dari 56 menjadi 49 agar NU

⁶⁴Haris, *Op. Cit.*, h. 67-69.; Marijan, *Op. Cit.*, h. 115.

tidak menjadi kekuatan mayoritas di sana.⁶⁵ Perbedaan pendapat ini menyebabkan PPP sulit mencari kata sepakat tentang Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR dari PPP untuk pemilu 1982, bahkan sampai batas akhir penyerahan DCS ke LPU 27 September 1981. Sekalipun NU memberikan toleransi selama satu bulan, kesepakatan masih saja sulit di capai. Maka pada tanggal 27 Oktober 1981, Jailani Naro, Ketua Umum DPP PPP saat itu, bersama beberapa orang temannya menyerahkan DCS hasil pilihannya sendiri kepada Mendagri selaku ketua LPU. DCS itu berjumlah 625 calon, dengan perimbangan "calon jadi": 49 untuk NU, 29 MI, 16 SI, dan 5 Perti.⁶⁶

Rasa tidak puas ini memaksa NU mengajukan protes secara resmi kepada LPU tanggal 16 Nopember 1981 dan DPP melalui sebuah surat pernyataan penolakan DCS versi Naro, yang ditandatangani Rais Aam KH. Ali Maksud, Ketua Umum PBNU, KH. Idham Khalid, dan Sekjen PBNU, H. Muhammad Munasir. Namun Mendagri selaku ketua LPU melalui Sekretaris Umum, R.

⁶⁵Marijan, *Ibid.*, h. 115. Tokoh MI bahkan menuntut distribusi kekuasaan mengacu pada hasil pemilu 1955. Klaim ini sangat tendensius, sebab mereka beranggapan bahwa MI adalah kelanjutan dari Masyumi yang pada pemilu 1955 berada di atas NU dalam perolehan suara. Sebagai kelanjutan Masyumi, MI merasa wajar jika menuntut perolehan kursi yang lebih banyak dari NU. Namun pernyataan diri MI sebagai kelanjutan Masyumi ditentang oleh Natsir, tokoh terpenting Masyumi dulu. Lihat Fathoni dan Zen, *Op. Cit.*, h. 64-65.

⁶⁶Haris, *Op. Cit.*, h. 69.

Suprpto tanggal 7 Nopember 1991 menolak protes itu, dan tetap menilai bahwa daftar calon yang di ajukan oleh DPP PPP adalah sah dan karena itu tidak perlu di persoalkan.⁶⁷ Bahwa DCS itu disusun tanpa melalui musyawarah tidaklah menjadi persoalan dalam penilaian LPU, sebab agaknya, kriteria tunggal keabsahan DCS adalah adanya tandatangan dari Ketua Umum DPP, dan itu sudah terpenuhi. Mau tak mau, NU harus bersedia menerima "kekalahan" itu.

Menghadapi kenyataan itu, sikap para elit berbeda-beda, seperti yang tercermin dalam polemik antara KH. Yusuf Hasyim (yang termasuk tokoh yang tersingkir) dengan KH. Ali Yafie. Yusuf Hasyim menyerukan agar warga NU Jawa Timur mencoblos untuk daerah DPRD saja dalam pemilu nanti, dan tidak mencoblos DPR-RI. Pernyataan ini ditentang oleh KH. Ali Yafie dan Khalid Mawardi yang menilai Yusuf Hasyim tidak paham kepribadian NU, dan generasi muda agar tidak mengikuti hasutan Yusuf Hasyim.⁶⁸

Polarisasi juga muncul dari tubuh NU berkaitan dengan cara pandang tentang keberadaan mereka dalam PPP yang selama ini telah banyak mendatangkan kekecewaan. Dalam hal ini terdapat tiga kelompok yang berbeda pendapat. Pertama, adalah kelompok yang menghendaki agar NU tetap berpolitik

⁶⁷Tempo, 21 Nopember 1991.

⁶⁸Ibid., h. 66-67.

praktis. Tokoh kelompok ini adalah Idham Khalid. Kelompok kedua adalah mereka yang menginginkan agar NU kembali kedalam Jamiyah secara tuntas dan meninggalkan kegiatan politik. Termasuk dalam kelompok ini adalah KH. Ali Maksum dan KH. Ahmad Siddiq. Lalu kelompok ketiga, antara lain Yusuf Hasyim, menginginkan NU kembali ke Khittah 1926 tapi tetap berpolitik.⁶⁹

Lalu, untuk merumuskan secara jelas dan kompak cara pandang NU tentang keberadaanya dalam PPP, PB Syuriah NU, mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 1982 di Jakarta. Rapat tersebut antara lain berpendapat bahwa,

Nahdlatul Ulama akan mempertimbangkan kedudukannya dalam lingkungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada saat yang tepat, apabila azas musyawarah, solidaritas intern dan prinsip-prinsip organisasi lainnya tidak dapat ditegakkan di dalamnya.⁷⁰

Betapapun hasil pemilu 1982 sangat jelas tidak akan mendatangkan keuntungan politis bagi NU, namun warga NU dihimbau untuk tidak terjebak dalam kebimbangan saat harus menentukan pilihan.⁷¹ Pola pikir ini tampaknya berjalan di

⁶⁹Lihat Anam, *Op. Cit.*, h. 280.

⁷⁰Seperti dikutip dalam *Ibid.*, h. 287. Disini, secara implisit NU tampaknya menegaskan bahwa ia telah sedang mempertimbangkan kedudukannya dalam PPP, sebab prinsip-prinsip yang disebutkan itu jelas telah banyak dilanggar di dalamnya.

⁷¹Fathoni dan Zen, *Op. Cit.*, h. 69.

atas sebuah kaidah fiqih yang di yakini NU: Apa yang tidak bisa diperoleh seluruhnya, jangan di lepaskan seluruhnya. Jadi, betapaun sedikitnya hasil yang akan diperoleh, ia harus tetap diambil. Karena itu, NU tetap aktif dalam kampanye PPP termasuk tokoh-tokoh yang tersingkir dalam DCS. Namun suasana konflik menjelang pemilu 1982, PPP memperoleh 94 kursi di DPR, kembali turun 5 kursi di banding pemilu 1977,⁷² padahal saat itu jumlah anggota DPR telah mengalami eskalasi.

Sementara itu, kekecewaan dalam PPP membawa NU pada introspeksi akan kepemimpinan organisasinya. Para ulama banyak menilai bahwa segala kerugian yang dialami NU berhulu pada lemahnya kepemimpinan Idham Khalid, terutama dalam hal power bargaining. Maka pertemuan 10 ulama NU di Surabaya, 1 Mei 1982 menyepakati guna menghimbau Idham Khalid untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan mandat kepada Rais Aam. Faktor lemahnya kesehatan fisik Idham Khalid adalah alasan yang di pilih.⁷³

Idham Khalid lalu bersedia menandatangani surat pengunduran dirinya pada tanggal 2 Mei, hanya saja pengumuman surat pengunduran diri itu ditunda sampai tanggal 6, mengingat pada tanggal 4 akan dilaksanakan

⁷²Rusti Karim, *Op. Cit.*, h. 212.

⁷³*Tempo.*, 4 September 1982: 12.

pemilu.⁷⁴

Namun begitu pernyataan itu di umumkan, reaksi keras berdatangan dari pendukung Idham. Bagi mereka, pengunduran diri Idham hanya di mungkinkan melalui forum Muktamar, sebab lewat forum inilah dia diangkat. Tindakan para ulama itu lalu dianggap sebagai kudeta. Didorong oleh begitu banyaknya dukungan, termasuk dari 17 pengurus Cabang NU terhadapnya, Idham lalu membuat surat pernyataan pencabutan kembali pengunduran dirinya.⁷⁵

Kejadian ini segera mengundang konflik dan perpecahan dalam tubuh NU. Idham merasa tetap sebagai Ketua Umum PBNU, sementara para ulama tetap memegang prinsip bahwa surat pengunduran diri Idham telah sah dan tidak bisa dicabut kembali. Jadi jabatan Ketua Umum yang telah diserahkan kepada KH. Ali Maksum (Rais Aam NU) tidak dapat diminta kembali. Sulitnya dicapai kata sepakat akhirnya membawa NU pada dualisme kepemimpinan antara kelompok ulama yang dimotori oleh KH. As'ad Syamsul Arifin Situbondo (karena itu disebut sebagai kubu Situbondo) dengan kelompok politisi yang dipimpin oleh Idham Khalid (kubu Cipete).

Betapapun, kedua pihak yang berbed pendapat tampaknya sama-sama berusaha untuk menemukan solusi bagi konflik yang

⁷⁴ Ibid., : 13

⁷⁵ Tentang kemelut kepemimpinan NU ini, lihat Ibid., h. 70-75; atau Marijan, *Op. Cit.*, h. 120-125.

tidak sehat itu. Kubu Cipete menginginkan diadakannya muktamar. Sedangkan kubu Situbondo lebih memperhatikan perlunya diadakan Munas Alim Ulama NU. Apapun, KEdua kubu sama-sama menyatakan Muktamar maupun Munas akan membicarakan penerimaan pancasila sebagai azaz tunggal.⁷⁶ Semua pihakdalam NU agaknya menyadari betul bahwa pertentangan yang sudah terbuka menyebabkan campur tangan pemerintah tak terelakkan lagi. Masa depan NU lalu turut ditentukan oleh arah dukungan pemerintah kepada pihak yang terkait (apakah Muktamar atau Munas yang diijinkan), serta bagaimana NU menanggapi Pancasila sebagai isu nasional. Pihak pemerintah ternyata mendukung kubu Situbondo dengan memberikan lampu hijau bagi terselenggarakannya Munas. Dan pihak pemerintahpun memberikan dukungan finansial atas suksesnya acara itu, bahkan Presiden Suharto sendiri berkenan hadir dalam acara pembukaan, serta serangkaian ceramah yang disampaikan oleh beberapa menteri

Kejelasan sikap pemerintah yang mendukung kubu ulama ini ternyata cukup meredakan perpecahan. Kedua pihak yang berkonflik akhirnya lebih berkomitmen pada kerukunan jam'iyah daripada kepentingan sendiri. Sikap ini tampak jelas setelah dilangsungkannya Munas Alim Ulama NU di Situbondo (18-21 Desember 1983). Munas ini menghasilkan

⁷⁶Fathoni dan Zen, Ibid., h. 78.

antara lain dua keputusan pentingtentang Pemulihan Khittah 1926 dan pemantapan Pancasila sebagai asas tunggal.⁷⁷ Keputusan Munas ini lalu dikukuhkan dalam Muktamar NU pada akhir tahun berikutnya di kota yang sama.

Salah satu konsekuensi penting kembali ke Khittah 1926 adalah lepasnya ikatan NU dengan organisasi politik manapun. Keputusan Muktamar tentang Khittah NU antara lain menyebutkan bahwa Naahdlatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.⁷⁸ Itu berarti, NU secara resmi keluar dari PPP.

B. Menuju NU Baru: Muktamar Situbondo 1984.

Bahwa *concern* yang berlebihan kepada dunia politik akan membawa efek terlalu menonjolnya kepentingan pribadi elit NU dibandingkan kepentingan jamaah, dan bahwa itu juga menyebabkan Nu setahap demi setahap mulai kehilangan bidang-bidang kegiatan lainnya: dakwah, pendidikan, sosial dan budaya, sudah sejak lama muncul dalam benak kesadaran NU. Keinginan untuk mengoreksi kesadaran ini sudah sejak dini dilontarkan, dan oleh karena itu pemikiran untuk kembali ke khittah 1926 bukanlah suatu hal baru.

⁷⁷Sitompul, *Op. Cit.*, h. 166

⁷⁸Keputusan Muktamar NU No. 02/MNU-27/1984 Tentang Khittah Nahdlatul Ulama.

Pertama kali gagasan itu dilontarkan dalam Mukhtamar ke-22 di Jakarta, Desember 1959. Seorang juru bicara dari Pengurus Cabang Mojokerto, KH. Achyat Chalimi menilai bahwa

Peranan politik oleh partai NU telah hilang dan peranan dipegang oleh perorangan, hingga partai sebagai alat sudah hilang. Oleh karena itu, diusulkan agar NU kembali kepada Khittah 1926.⁷⁹

Lalu, pemikiran serupa kembali digelindingkan tahun 1971 dalam Mukhtamar ke-25 di Surabaya. Kali ini gagasan datang dari Rais Aam KH. Wahab Hasbullah, dan barangkali karena itulah memperoleh sambutan yang lebih baik. Dan pada Konferensi Besar (Konbes) pada tanggal 5-8 Mei 1975 di Jakarta, akhirnya keluar "Pernyataan Pemantapan Kedudukan dan Fungsi Jam'iyah Nahdlatul Ulama". Dalam pernyataan ini memiliki tiga pokok pikiran. Pertama, pemantapan eksistensi dan peran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang lebih berkonsentrasi pada kegiatan keumatan. Dua, Penciptaan kondisi aman dalam rangka kontinuitas pembangunan nasional. Ketiga, Nahdlatul Ulama harus memberikan kontribusi kongkrit bagi pembangunan Indonesia dengan tetap berpegang pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.⁸⁰ Dalam pernyataan itu telah jelas bahwa salah satu persoalan yang cukup

⁷⁹Marijan, *Op. Cit.*, h. 132.

⁸⁰MA. Sahal Mahfudh, *NU-nisasi Orpol ?* dalam MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 221-222

serius diperdebatkan adalah kehendak NU kembali kepada garis perjuangannya di tahun 1926 ketika pertama kali didirikan: mengurus persoalan agama, pendidikan, dan sosial-kemasyarakatan saja.⁸¹ Namun begitu, gagasan itu akhirnya tidak dapat terlaksana, kalah oleh arus-arus keinginan untuk mempertahankan NU tetap berpolitik praktis.

Kandasnya gagasan kembali ke Khittah sampai kurun waktu ini, jika diperhatikan, disebabkan setidaknya oleh dua hal. Pertama, gagasan itu semata-mata dilandasi oleh alasan politis (NU akhirnya hanya menjadi alat kepentingan politik pribadi para elit saja), dan karena itu solusi yang ditawarkan pun bersifat senada, dan tidak populer: agar NU meninggalkan gelanggang politik sama sekali. Di tengah begitu banyaknya keuntungan yang diperoleh NU dalam pergulatan politiknya, wajar saja keinginan untuk meninggalkan peran politik ini lalu hanya dipandang dengan sebelah mata. Terlebih lagi jika diingat bahwa pada saat itu peran kelompok politik (Idham Khalid dan kawan-kawan yang biasanya dipolarisasikan dengan kelompok ulama) masih dominan dalam tubuh NU.

Kedua, secara aktual konsep kembali ke Khittah tidak terumus secara jelas selain dalam pengertian minimal "kembali pada tahun 1926". Dan ini bisa dinilai sebagai

⁸¹Marijan, *Ibid.*, h. 133.

langkah mundur serta penihilan terhadap nilai-nilai yang diperoleh NU dalam pengalamannya selama ini. Ketika jelas itulah, boleh jadi yang menyebabkan pikiran ini memperoleh respons yang agak ganjil ketika Muktamar ke-25 antara lain memutuskan untuk :

Mempertimbangkan gagasan tentang sebuah wadah baru yang non-politis yang menampung dan membimbing aspirasi Islam ahlusunnah wal-jamaah di kalangan umat, yang oleh karena faktor-faktor lain harus meninggalkan ikatan-ikatan politiknya dengan partai politik.⁸²

Perumusan secara lebih jelas tentang konsep kembali ke Khittah 1926 baru mulai berkembang menjelang Muktamar ke-26 di Semarang pada tahun 1979. Landasan pemikiran yang dulunya semata-mata politis, kini dilengkapi dengan alasan moral. Merenungi perjalanan politik NU selama ini, seorang ulama berpengaruh dari Jawa Timur, KH. Machrus Ali, menyebutkan bahwa telah terjadi kerusakan bathiniyah yang parah dalam NU, dan para tokohnya dianggap terlalu al-riyasa dan hub al-jamaah.⁸³

Ulama senior NU lainnya yang juga berasal dari Jawa Timur, KH. Ahmad Siddiq, menilai perlunya segera dirumuskan

⁸²PRNU, Keputusan NU ke-25 di Surabaya, seperti dikutip dalam Ibid., h. 135. Cetakan miring dari penyusun.

⁸³Slamet Effendi Yusuf, Op. Cit., h., 83. Atau lihat juga, Arief Mudatsir, Dari Situbondo Menuju NU Baru: Sebuah Catatan Awal, dalam Prisma Nomor Ekstra, 1984, h. 133.

tekad untuk kembali ke "Khittah Nahdliyah", garis-garis besar tingkah laku perjuangan NU dan generasi penerusnya, serta semakin luasnya medan perjuangan dan bidang garapan NU. Di samping itu, ulama generasi pendiri NU telah semakin berkurang jumlah dan peranannya dalam kepemimpinan NU. Itulah sebabnya, NU dikhawatirkan akan kehilangan arah di masa nanti jika prinsip Khittah Nahdliyah tidak secepatnya disusun rumusannya.⁸⁴

Jika pemikiran korektif semacam itu hanya datang dari kalangan ulama, barangkali wajar mengingat keprihatinan mereka akan terlalu dominannya para kelompok politisi di Tanfidziyah dalam kepemimpinan NU yang secara tidak langsung mengurangi peran ulama. Namun sementara itu muncul sebuah generasi baru NU dengan spesifikasinya sendiri. Mereka bukan kelompok ulama yang dapat digolongkan dalam kubu Situbondo, dan bukan pula kelompok politisi yang tergolong dalam kelompok Cipete. Mereka lebih tampak sebagai intelektual yang tampil dengan gagasan-gagasan "jalan tengah", dan, karena netralitas mereka dalam polarisasi ulama-politisi itu, gagasan mereka bisa lebih objektif dan relatif mudah diterima oleh semua kalangan NU.

Dalam dasawarsa 70-an, orang-orang ini banyak melakukan diskusi untuk merumuskan langkah-langkah

⁸⁴Fathoni dan Zen, Op. Cit., h. 95.

pembaharuan NU. Mereka turut merasakan keprihatinan akan mundurnya NU selama ini, namun tetap menyadari bahwa politik merupakan dimensi yang cukup penting dalam aktivitas NU secara keseluruhan, melihat dalam masa kelahiran NU, terkandung nilai-nilai politis. Namun demikian hubungan NU dengan politik lebih ditentukan dengan sejauh mana persepsi NU tentang politik itu, sehingga persoalannya adalah tentang kualitas politik. Konteks politik semestinya tidak hanya dilihat secara sempit dalam distribusi pada kekuasaan di DPR misalnya, namun dilihat sebagai upaya mengangkat kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Dalam makna demikian, keikutsertaan NU sangat penting artinya, dan orientasi aktivitas NU yang terlalu didominasi politik praktis bisa diluruskan dengan tampilnya seorang pemimpin yang mampu menata semua bidang garapan NU secara proporsional.⁸⁵

Melalui segala pergulatan pemikiran ini kelompok intelektual generasi baru NU itu lalu sampai pada kesimpulan bahwa NU memerlukan perubahan dalam garis-garis perjuangannya, dengan tetap berpegang pada semangat dan ide dasar perjuangan 1926. Karena itu, sekalipun mereka mengajukan gagasan kembali ke Khittah 1926 sebagaimana sebagian senior mereka, namun kali ini gagasan tersebut

Ibid., h. 96.

telah ditopang oleh fondasi dan rancang bangunan yang lebih kokoh. Dan ini secara bertahap dibuktikan dengan tindakan nyata. Sekitar tahun 1974, kalangan ini --Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, Said Budairy, Rozi Munir, Abdullah Sarwani, Slamet Effendi Yusuf, untuk menyebut beberapa nama-- mulai melakukan perubahan ide-ide pembaharuan di kalangan pengurus, ulama dan tokoh-tokoh muda lainnya, sehingga pada tahun 1979 ide-ide itu mulai diterapkan melalui lembaga-lembaga otonom NU.⁸⁶

Hasilnya, kritik kelompok ini menyuarakan usulan untuk kembali ke Khittah 1926 di Muktamar Semarang, sambutan yang diperoleh sangat menggembirakan. Dalam program Dasar Pengembangan Lima Tahun, sebagai hasil keputusan Muktamar diuraikan tujuan: (1) Menghayati makna seruan kembali ke jiwa 1926, (2) Memantapkan upaya intern untuk memenuhi seruan tersebut, dan (3) memantapkan cakupan partisipasi Nahdlatul Ulama secara lebih nyata dalam pembangunan bangsa.⁸⁷

Betapapun, gagasan kembali ke Khittah tetap berada dalam pro-kontra. Orang-orang seperti Idham Khalid dan kelompoknya masih tetap menghendaki politik praktis.

⁸⁶Arief Mudatsir, Loc. Cit., h. 139.

⁸⁷PENNU, Program Dasar Pembangunan Lima Tahun Nahdlatul Ulama: Keputusan Muktamar NU ke-26, seperti dikutip dalam Marijan, Op. Cit., h. 136.

Sementara, golongan yang kecewa terhadap PPP mendukung gagasan kembali ke Khittah itu.⁸⁸

Namun upaya pembaharuan NU terus membola-salju. Sambil melakukan pola rekonsiliasi dalam menetralsir konflik Cipete-Situbondo, kelompok intelektual muda NU terus mengadakan komunikasi intensif dengan mendatangi tokoh-tokoh pesantren, para dendikiawan juga mengumpulkan generasi muda NU dalam kelompok diskusi.⁸⁹

Pada bulan Mei 1983 kelompok ini menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh 24 tokoh muda NU, terkenal dengan nama "Majlis 24"⁹⁰, yang bertujuan melakukan refleksi terhadap NU, dengan kesepakatan penting terbentuknya "Tim Tujuh untuk Pemulihan Khittah NU 1926". Tim yang terdiri atas Abdurrahman Wahid (Ketua), HM. Zamroni (Wakil), Said Budairy (Sekretaris), H. Mahbub Djunaedi, Fahmi Saifuddin, HM. Deniel Tandjung, dan Ahmad Bagja (Anggota) ini bertugas merumuskan konsep pembenahan

⁸⁸ Ibid., h. 138.

⁸⁹ Arif Mudatsir, Loc. Cit.

⁹⁰ Ibid., h. 140. Ke-24 orang tokoh NU itu adalah: KH. Sahal Mahfudz, H. Musthafa Bisri, Asip Hadi Pranoto, H. Mahbub Djunaedi, H. Abdurrahman Wahid, HM. Tolhah Hasan, HM. Zamroni, HM. Munasir, dr. Fahmi Saifuddin, HM. Said Budairy, HM. Saiful Mujab, Abdullah Syarwani, Muhammad Tohir, KH. Muhit Muzadi, H. Umar Busalim, Chalil Musadat, A. Ghaffar Rahman, Slamet Effendi Yusuf, H. Ichwan Syam, Musa Abdillah, Mustafa Zuhad, HM. Daniel Tanjung, Ahmad Bagja, dan Masdar Farid Mas'udi.⁹⁰

dan pengembangan NU sesuai Khittah 1926 serta menyusun pola kepemimpinan NU.⁹¹ Rumusan yang dihasilkan kemudian diajukan sebagai bahan dalam Munas Alim Ulama dan Mukatamar NU ke-27 di Situbondo, 1983, 1984. Dan dari kedua forum ini dihasilkan perubahan Anggaran Dasar, Program Dasar Pengembangan NU, serangkaian Rekomendasi mengenai masalah sosial, politik, ekonomi, dan agama, serta yang paling monumental adalah penerimaan asas tunggal Pancasila dan keputusan kembali ke Khittah 1926.

Mengenai asas negara Pancasila, NU menegaskan dalam Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam bahwa :

1. Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 (1) UUD 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dan Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syariat, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila menurut perwujudan upaya umata Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap diatas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.⁹²

⁹¹Ibid.

⁹²Keputusan Munas Alim Ulama NU No. II/MAUNU/1404/1983 Tentang Pemulihan Khittah NU 1926. Seperti juga dikutip oleh Einar Sitompul, Op. Cit., h. 167-168.

Ada tiga alasan, mengapa kemudian NU menerima asas tunggal Pancasila. *Pertama*, Konsep Fitrah; bahwa Pancasila di nilai sebagai produk perkembangan masyarakat, maka dia pun diterima. Tapi penerimaannya tidak dapat menggantikan Islam. Sebab Islam dari Allah SWT. *Kedua*, Konsep Ketuhanan; Konsep ini adalah Tauhid. Inilah sebabnya negara Indonesia bukanlah negara sekuler tetapi juga bukan negara teokrasi. *Ketiga*, Pemahaman Sejarah; bahwa umat Islam telah menentang penjajah dalam rangka kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka umat Islam dan negara adalah bagian integral.⁹³

Sedangkan mengenai garis-garis besar dan ide dasar perjuangannya, yang dirumuskan sebagai Khittah Nahdlatul Ulama, Muktamar NU membuat definisi bahwa:

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah-laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- b. Landasan tersebut adalah paham Islam Ahlussunnah wal-jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, melalui dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.

⁹³Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), h. 268-269.

c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.⁹⁴

Kembalinya NU ke khittah 1926 memang berimplikasikan dirumuskannya orientasi perjuangan yang baru dengan tetap berakar pada ide dasarnya semula, dan untuk itu diperlukan aktor-aktor baru, yang tumbuh dalam suasana hubungan yang baru pula, baik antar elit NU sendiri maupun antar mereka dengan pemerintah. Kembali ke Khittah 1926 juga membawa konsekuensi organisatoris. Misalnya, NU akan mengembalikan pola kepemimpinannya pada supremasi ulama. Sebab dalam tekanan sebagai jamiyah diniyah mau tidak mau NU memerlukan kharisma ulama yang bertugas sebagai pemandu dan pengawas organisasi. Ini berarti pemberian kembali bobot peran yang lebih signifikan kepada Syuriah. Konsekuensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah penegasan bahwa NU tidak terikat dengan organisasi politik dan kemasyarakatan manapun, termasuk PPP.

Setelah memutuskan kembali ke Khittah 1926, NU memang bukan semata-mata tampil kembali sebagai NU di tahun 1926. Ia pun jelas sekali bukan seperti NU tahun 1952, saat keluar dari Masyumi. Ia adalah sebuah NU baru yang lahir dari perenungan politik yang matang berdasarkan pengalaman

⁹⁴Keputusan Muktamar NU No. 02/MNU-27/1984 Tentang Khittah Nahdlatul Ulama.

panjang, dan yang diwarnai oleh penghayatan moral yang mendalam akan makna hakiki Khittah 1926 itu.